

IDENTITAS POLITIK KAUM BERSARUNG : RELASI THALIBAN DAN HUDA DALAM PROSES DAMAI ACEH

Mahmuddin

Fakultas Dakwah dan Komunikasi

UIN Ar-Raniry Banda Aceh

mahmuddin_spd@yahoo.co.id

ABSTRACT

This study discussed the involvement and the ideology of politics of Taliban, HUDA in the Aceh peace process. Since the emergence of the Rabithah Taliban Aceh movement (which later briefed as RTA) on April 7, 1999, was inseparable from social and political turmoil when the issues of referendum developed widely in the community. The power built by Taliban and HUDA has been able to bring considerable influence in the event of political accumulation when the issues of referendum and independence became a requisite for the process of resolving the Aceh conflict. The peace process realized in Aceh in 2004 by involving international parties to the realization of the peace agreement in Helsinki. Taliban and HUDA again voiced and gave political ideas in the arena of social and political development in Aceh. The struggle was intensified when the wishes of the people were not the same as the needs of the State.

Keywords: *Taliban, HUDA, Social Movement, Political Identity, Peace of Aceh*

A. PENDAHULUAN

Masalah di Aceh sampai saat ini masih menyisakan polemik di dalamnya. Semua polemik yang ada tidak serta merta muncul secara spontan seperti yang saat ini, tetapi permasalahan yang muncul adalah muara dari akumulasi pergolakan politik di Aceh secara global dari dekade orde lama hingga pasca Orde Baru. Goncangan krisis politik, identitas dan bahkan ekonomi menjadi pemicu munculnya slogan-slogan dari masyarakat yang munculnya kearah perbaikan sosial dan ekonomi masyarakat Aceh. Munculnya gerakan Rabithah Taliban Aceh (yang selanjutnya di singkat RTA) tepatnya tanggal 7 April 1999, tidak terlepas dari gejolak sosial dan politik ketika santer isu-isu referendum berkembang di masyarakat. Di satu sisi kemunculan Taliban mendorong

sejumlah analisa dari berbagai pihak, baik kalangan cendekiawan, pemerintah, aparat maupun dunia internasional tentang kemunculan gerakan ini, serta berbagai pertanyaan lainnya diinterpretasikan seiring menguatnya konflik Aceh. Tapi disisi yang lain munculnya gerakan Thaliban, menghilangkan image pada masyarakat yang sebelumnya menilai bahwa santri kurang instens terhadap *sense of crisis* dari berbagai persoalan pada masa eskalasi konflik di tahun 1999, baik yang berkaitan dengan kondisi sosial dan politik maupun persoalan keagamaan.

Munculnya Himpunan Ulama Dayah Aceh (yang selanjutnya disingkat HUDA) ditengah berbagai aksi kekerasan, dan terpecahnya kelompok masyarakat yang menuntut merdeka (GAM), mendukung otonomi khusus dan mendukung referendum, menimbulkan pertanyaan besar di berbagai kalangan dari pemerintah hingga masyarakat awam. Mengapa HUDA muncul, apakah tidak sama dengan MUI (sekarang MPU), serta apakah HUDA berseberangan ide dengan MUI (baca MPU) atau sudah terjadi perpecahan dikalangan ulama. Dan masih banyak lagi pertanyaan mendasar dengan terbentuknya HUDA. Terbentuknya HUDA di akhir tahun 1999-2001¹ yang selanjutnya juga disebut induk semang Thaliban-adalah suatu proses perjalanan panjang dari ulama Aceh khususnya dari pesantren tradisional yang mensikapi berbagai gejolak sosial politik ditengah meningginya eskali konflik pada masa runtuhnya Orde Baru.

Kekuatan yang dibangun Thaliban dan HUDA, telah mampu membawa pengaruh yang cukup besar di saat terjadi akumulasi politik pada saat isu-isu referendum dan merdeka menjadi syarat proses penyelesaian konflik Aceh. Selama itu pula Thaliban dan HUDA menjadi eksis dan mampu memposisikan diri dalam peta politik diantara pihak yang berkonflik. Sikap HUDA yang mendukung suara mahasiswa (baca SIRA) dan Thaliban yang sama-

¹ Ibrahim Bardad. (2008), *Resolusi Konflik Dalam Islam kajian Normatif dan Historis Ulama Dayah*. Banda Ceh: Aceh Institute Press.

sama menuntut digelarnya referendum dalam proses penyelesaian konflik di Aceh tidak hanya mengejutkan masyarakat awam, namun juga mendapat pujian dari pihak GAM, karena ulama (HUDA) dinilai telah berpihak pada rakyat, dan tidak seperti kesan masyarakat sebelumnya bahwa para ulama terkooptasi oleh kekuasaan. Namun menjelang menguatnya eskalasi konflik di akhir tahun 1999-2001 yang kemudian disepakati beberapa perundingan antara pemerintah pusat dan GAM seperti yang tertuang dalam memorandum bersama dalam CoHA (*Cessation of Hostilities Agreement*) pada tahun 2001² oleh HDC, maupun pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Khusus tahun 2001, suara-suara Thaliban dan HUDA semakinjarang terdengar. Malah sebagian masyarakat awam dan juga cendikiawan mempertanyakan kembali keeksistensian Rabithah Thaliban Aceh (RTA) dan HUDA yang sebelumnya memberi pengaruh yang cukup besar dalam proses penyelesaian konflik Aceh.

Pada tahun 2004 Thaliban dan HUDA kembali bersuara dan memberikan ide-ide politik dalam kancah perkembangan sosial dan politik di Aceh. Konteks ini memberi dinamika tersendiri hingga sekarang ini dalam konteks ideologi politik kaum santri dan ulama dayah tradisional terhadap iklim perdamaian di Aceh. Wacana rekonsiliasi dan menyatukan pendapat untuk menuju Aceh yang damai semakin semarak disorakkan dan ditulis di majalah maupun koran lokal dan Nasional. Pergulatan tersebut juga membangkitkan kembali gerakan-gerakan sipil, termasuk Thaliban dan HUDA dalam proses perdamaian Aceh. Keterlibatan gerakan santri di Aceh (Thaliban) dan ulama dayah tradisional (HUDA) menjadi alur yang menarik di cermati lebih jauh dengan pendekatan sosiologis dari wujud ideologi politik santri dan ulama dayah di saat suara-suara reformasi dari proses damai di Aceh sebagai sebuah keniscayaan dari dinamika pergulatan politik di saat Negara menghampiri rakyatnya. Konteks inilah yang kemudian memperlihatkan

².Abdul Rachman Patji dkk. (2008). *Negara dan Masyarakat dalam Konflik Aceh : Studi Tentang Peran Pemerintah dan Masyarakat Dalam Penyelesaian Konflik Aceh*, Jakarta:LIPI

bagaimana pelibatan santri dan ulama dayah menarik untuk ditelaah secara komprehensif.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini memfokuskan diri pada pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data dilakukan secara triangulasi dengan pengamatan, studi dokumentasi dan wawancara mendalam. wawancara mendalam dilakukan melalui kontak atau hubungan pribadi (individu) dalam bentuk tatap muka antara peneliti dengan subjek penelitian (responden yang telah ditentukan/dipilih). Wawancara yang dilakukan selalu berpegang pada pedoman wawancara atau (*interview guide*) kendatipun tentunya akan berkembang seiring dengan konteks masalah yang ditemui di lapangan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis data kualitatif merupakan model penelusuran terhadap pernyataan-pernyataan umum tentang hubungan antar berbagai kategori data untuk membangun pemahaman konseptual tentang realitas sosial berdasarkan temuan empirik.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gerakan Thaliban dan HUDA : Arah Politik Indentitas

Hingar bingar dinamika politik yang terjadi di Indonesia, dan hingga menyebabkan runtuhnya pemerintahan Orde Baru telah menyebabkan terbukanya ruang publik yang berdampak pada munculnya gerakan sipil yang mengusung digelarnya demokrasi secara permanen. Tuntunan tersebut juga bergema di Aceh dengan munculnya berbagai gerakan sipil menggelar aksi kemanusiaan menuntut pemerintah menuntaskan semua pelanggaran HAM pada saat digelarnya operasi militer (DOM) untuk memberantas separtis GAM. Tuntutan tersebut tidak hanya dilakukan mahasiswa yang kemudian tergabung dalam SIRA, atau yang dilakukan santri dengan terbentuknya Rabithah Thaliban Aceh (RTA) pada tanggal 7 April 1999 yang mengusung isu-isu referendum dalam proses penyelesaian kasus Aceh,

dan bahkan juga munculnya kaum ulama yang tergabung dalam HUDA (himpunan ulama dayah Aceh) yang menuntut digelarnya referendum sebagai jalan terbaik dalam penyelesaian kasus Aceh (Syamsuddin, 2000, Bardan, 2008; Rachman Patji, 2004; Ju Lan, 2005)

Transformasi gerakan sipil menjadi gerakan politik ini menjadi catatan penting dalam upaya membangun demokrasi di Aceh, khususnya paska konflik berkepanjangan sejak tahun 1976, meskipun kemudian hasil pemilu legislatif 2009 di Aceh menunjukkan bahwa satu-satunya partai lokal yang mendapatkan kursi terbanyak adalah Partai Aceh, sementara partai lokal lainnya tidak memperoleh kursi sama sekali di DPR Aceh kecuali PDA, yang hanya meraih satu kursi.

Posisi gerakan sipil terhadap partai politik di Aceh mengalami dinamika yang sangat fluktuatif. Sebelum adanya perjanjian damai antara pemerintah Republik Indonesia (RI) dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki, aktivis sipil di Aceh umumnya mengambil posisi anti terhadap partai politik. Gerakan anti terhadap partai politik karena partai politik dianggap sebagai perpanjangan tangan pemerintah Jakarta. Partai politik juga dianggap tidak mampu merubah kondisi Aceh yang tertindas oleh operasi militer yang terus berkelanjutan, sebaliknya mendukung proses demokrasi dan eksistensi parpol dianggap hanya akan membuktikan bahwa Aceh menjadi bagian dari sistem Indonesia. Sehingga kesimpulan untuk memboikot pelaksanaan pemilu tahun 1999 dan tahun 2004 merupakan bentuk perjuangan melawan hegemoni Indonesia dalam perspektif politik.

Sejarah munculnya gerakan Thaliban di tengah senternya isu-isu referendum mendorong berbagai pihak masyarakat untuk menganalisis mengapa gerakan ini muncul dan sejumlah pertanyaan lainnya terkait dinamika kondisi sosial politik saat itu. Munculnya Thaliban setidaknya tidak terlepas dari isu referendum, penuntasan pelanggaran HAM serta berbagai tuntutan yang mengarah pada upaya kepedulian pemerintah pusat dan dunia internasional menyangkut relasi masyarakat, GAM dan Negara. Pada konteksnya gerakan

Thaliban Aceh (yang selanjutnya di singkat RTA) dengan beranggotakan 75 ribu santri yang tersebar di Aceh tetap konsisten memposisikan sebagai wadah yang independen dan tidak tereduksi dalam dinamika politik GAM dengan Pemerintah Pusat.

Adanya gerakan Thaliban sebagai gerakan sosial pada intinya sangat terkait erat dengan komitmen seluruh santri sebagai *sense of crisis* mereka dalam memberikan respon atau reaksi atas kondisi tertentu di masyarakat. Meminjam istilah Bandaro (2001) terkait dengan dengan dua sasaran yang satu bermakna goals dan standards. Goal lebih pada konteks sasaran mutlak seperti percepatan pembangunan keagamaan, penegakan syariat Islam. Sedangkan standards dapat disebut *level achievement*, misalnya tuntutan referendum dan tuntutan penuntasan pelanggaran HAM.

Thaliban sendiri mendefinisikan pembangunan politik terutama politik Islam tidak harus menjadikan Aceh sebagai Nanggroe Islam. Sebaliknya, RTA lebih cenderung pada pendekatan subtansialistik atas doktrin kemasyarakatan Islam, dan menolak tegas pembangunan politik Islam yang hanya bersifat legalitas, formalistik dan simbolik semata. Hal ini dapat dapat dicermati dengan meminjam bahasa Esposito, "revival islamic" memposisikan gerakan Thaliban tidak hanya menyuarakan aspirasi pembangunan sosial politik dan budaya sesuai dengan nilai-nilai keAcehan, tetapi juga tidak *blind following* atas carut marut kondisi politik Aceh.

Munculnya HUDA (Himpunan Ulama Dayah Aceh) diakhir 1999 adalah proses perjalanan panjang dari ulama dayah Aceh yang mensikapi ekalasi konflik dan perpecahan dalam kelompok masyarakat mencari solusi atas konflik Aceh. Sejarah mencatat proses kelahiran HUDA terkait erat dengan isu perdamaian di Aceh. Kehadiran HUDA yang dimotori juga memiliki sejarah tersendiri dan tidak jauh berbeda dengan proster bentuknya PUSA. Berkat hasil musyawarah pertama yang dilakukan di Makam Syiah Kuala tanggal 13-14 September 1999, yang diikuti

oleh lebih kurang 600 peserta dari berbagai daerah yang ada di Aceh yang terdiri dari kalangan aktivismuda, mahasiswa, santri dan para ulama.

Tercapailah sebuah kesepakatan untuk mendirikan sebuah organisasi yang siap menampung aspirasi masyarakat dan berjuang menyelesaikan konflik yang berkepanjangan. Organisasi dimaksud diberi nama HUDA (Himpunan Ulama Dayah Aceh), didirikan di Makam Syiah Kuala Banda Aceh pada Tanggal 4 Jumadil Akhir 1420 H, bertepatan dengan Tanggal 14 September 1999 M dan berkedudukan di Kota Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

Inisiasi awal munculnya HUDA adalah kesediaan beberapa ulama merespon permintaan kaum muda dan aktivis dari kalangan mahasiswa, termasuk para santri tentang persoalan yang muncul dalam berbagai pertemuan yang mereka lakukan. Mereka bingung siapa yang bisa menyelesaikan persoalan yang sedang mereka hadapi. Persoalan inilah yang mendorong mereka meminta bantuan pada para ulama. Sebelumnya mereka mencoba menawarkan kepada NU, Dayah Shafiatuddin dan PARTI dan lain-lain, tetapi tidak ada satu organisasi pun yang bersedia.

Akhirnya muncullah inisiatif dari beberapa ulama untuk merespon keinginan mereka. Dari kalangan ulama muda yang hadir pada waktu itu adalah Tgk. H. Faisal Ali (Sekjen HUDA sekarang), Tgk Bulqaini (Lueng Bata), Tgk H. Baihaqi (Pimpinan HUDA Aceh Utara) dan Tgk. H. Anwar (Pimpinan HUDA Pidie Jaya, anak dari Abu Kuta Krueng), Tgk. Iskandar Zulkarnain (Malaysia). Sedangkan dari kalangan tua yang hadir pada waktu itu adalah Abu Tumin, Abu Kuta Krueng, dan Abu Panton.

Di tengah-tengah aksi kekerasan yang terjadi ketika itu dimana masyarakat terpecah menjadi kelompok yang mendukung Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menuntut kemerdekaan dan mendukung referendum dan yang mendukung otonomi luas. Para ulama ini tidak berhenti melakukan musyawarah untuk mencari solusi terhadap konflik berkepanjangan yang terjadi di Aceh. Musyawarah tersebut dilakukan pada tanggal 13 s/d 14 September 1999

diKomplek Makam Syiah Kuala Banda Aceh. Dalam musyawarah tersebut membahas mengenai tentang hukum agama tentang intimidasi, pembunuhan, penjajahan, pembakaran, dan pelanggaran HAM. Menariknya, salah satu hasil dari musyawarah tersebut HUDA mendesak pemerintah untuk segera mewujudkan referendum seperti yang diorasionkan oleh mahasiswa dan thaliban. Namun apakah untuk bergabung ataupun berpisah dengan negara kesatuan republik Indonesia (NKRI) itu menjadi pilihan masyarakat Aceh. Konflik dan penyelesaian konflik yang panjang di Aceh menjadi awal mula sejarah lahirnya HUDA di Aceh.³

Hal ini terlihat jelas melalui upacara doa bersama yang diselenggarakan sehari setelah HUDA terbentuk, tepatnya di pekarangan mesjid Raya Baiturrahman Banda Aceh tanggal 15 September 1999. Di hadapan 2000 pengunjung dibacakanlah putusan musyawarah HUDA ditandai dengan penaikan bendera putih yang bertuliskan referendum dan sekaligus pembukaan selubung billboard yang berukuran 4x16 meter, bertuliskan *Konflik Aceh dapat Diselesaikan dengan Referendum*, di pekarangan Mesjid raya Baiturrahman yang juga dihadiri oleh Bapak KH. Abdurrahman Wahid dan didampingi oleh Bapak Amin Rais. Pernyataan sikap ulama HUDA ini dengan tegas mendapat pujian dan penghargaan dari GAM, sebagaimana dikatakan oleh Tgk. Maulida (eksponen GAM wilayah Pase, Aceh Utara) kepada *Serambi Indonesia* yang memuji sikap ulama HUDA yang sudah berpihak kepada rakyat, dan tidak berhasil di beli oleh pemerintah.

HUDA tidak terlahir dengan mudah begitu saja, kemunculannya bukanlah yang sudah direncanakan tetapi merupakan hal yang tidak direncanakan samasekali. Pada awal kemunculannya HUDA adalah organisasi yang mendapat dukungan dari pihak pemerintahan yang ketika merasa terdesak dengan paksa andikarenakan empertimbangakan kiprah ulama serta dukungan

³Ibrahim Bardad, *Resolusi Konflik Dalam Islam kajian Normatif dan Historis Ulama Dayah*, Aceh Institute Press, Banda Aceh, 2008. Karim D Crow, *Aceh : The Special Territory in North Sumatera : A self-Fulfilling*, dalam *Journal of Muslim Minority Affairs*, Vo. 20 No. 1, 2000.

dari masyarakat luas terhadap perjuangan ulama yang sangat besar. Hal inilah yang memaksa pemerintah untuk mendukung berdirinya organisasi HUDA. HUDA berbeda dengan organisasi lainnya seperti Inshafuddin yang berorientasikan pendidikan, MPU yang bersifat independen maka HUDA merupakan organisasi yang berorientasikan kepada isu-isu kontemporer, lebih menjurus kepada politik. HUDA peduli terhadap hal-hal yang bersifat kontemporer, seperti isu perdamaian, dimana ada celah HUDA akan masuk untuk menawarkan solusinya. Tujuan utama dari HUDA masih sama dengan tujuan ulama pada umumnya, yaitu memperkokoh silaturahmi antar-ulama Aceh dalam rangka membina/membentuk ummat manusia yang sesuai dengan ajaran Islam. Eksistensi HUDA dalam perjalanan sejarah perjuangan masyarakat Aceh, memiliki peran signifikan, mulai dari awal kemunculannya sampai sekarang.

HUDA telah memainkan perannya dalam berbagai bidang. Berkat dukungan dari sejumlah dayah yang ada di Aceh, kini keberadaan dayah menjadi sangat penting, khususnya di bidang agama dalam upaya mewujudkan penerapan syari'at Islam di tanah Serambi Mekkah ini. Di bidang politik, ulama telah menghasilkan perdamaian dalam upaya penyelesaian konflik yang berkepanjangan di Aceh. Dilihat dari sejarah kemunculannya HUDA merupakan organisasi yang aktif dalam isu politik. Keterlibatannya sebagai sebuah organisasi tidak hanya sebagai organisasi yang memberikan solusi terhadap persoalan mengenai agama tetapi mencakup seluruh aspek persoalan kehidupan manusia. Keterlibatannya dalam dunia politik jelas terlihat dari awal kemunculannya yang memberikan solusi terhadap konflik Aceh yang berkepanjangan. Bahkan setelah penandatanganan perdamaian MoU Helsinki kiprah HUDA dalam politik masih sangat aktif.

HUDA terlibat aktif dalam proses perdamaian GAM-NKRI. HUDA mengirim utusan untuk berangkat ke Helsinki menghadiri proses MoU pada waktu itu adalah Tgk Zarkasyi Abdul Wahid. Sebetulnya yang diminta datang adalah pimpinan HUDA sendiri yang ketika itu adalah Tgk. H. Ibrahim

Bardan (Abu Panton), tetapi beliau tidak bersedia hadir pada waktu itu, dan mengutus Tgk. H. Zarkasyi Abdul Wahid (Pimpinan HUDA Aceh Utara). Abu Panton merupakan tokoh yang sangat disegani dan dihormati oleh pihak GAM, kalangan pemerintahan dan masyarakat. Beliau dinilai oleh banyak kalangan sebagai salah satu figur lokal yaitu ulama karismatik yang sangat tepat untuk ikut serta menjembatani proses perdamaian GAM-NKRI. Ini dikarenakan kapasitas beliau yang mampu menjalin hubungan yang baik dengan berbagai pihak terkait, terutama para pemimpin GAM dan komponen pemerintahan NKRI⁴.

Dialektika pergulakan politik yang ada dengan wujud hegemoni politik negara atas rakyat menjadi salah satu indikator dari munculnya gerakan sosial yang berbasis agama untuk mencari solusi dari pembangunan politik pasca Orde Baru dan hingga masa reformasi saat ini.

Peletakan prinsip-prinsip politik Islam yang digaungkan Thaliban dan HUDA dalam mengkomodir perdamaian di Aceh, tidak terlepas dari makna keadilan, musyawarah dan persamaan. Ezzati⁵ dalam bukunya "gerakan Islam sebuah analisis" mengemukakan pada intinya prinsip politik Islam tidak hanya berbicara hubungan manusia dengan manusia, tetapi juga berisikan prinsip hubungan dengan Tuhan. Hal ini senada dengan apa yang dikemukakan Kaoy Syah, bahwa pertama, politik Islam mengandung unsur manusia sebagai khalifah Allah yang bertugas menjaga permukaan bumi. Kedua, manusia dijadikan untuk mengabdikan kepada Allah. Ketiga, kekuasaan tertinggi semata-mata ada pada Allah. Keempat, bahwa dalam budaya politik Islam kedudukan solidaritas lebih kuat dari nilai-nilai kuasa.⁶

Munculnya gerakan sipil untuk menuntut kembali identitas keAcehan yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama, merupakan salah satu solusi yang tepat dalam

⁴Bahtiar Effendy. (2001). *Teologi Baru Politik Islam : Pertautan Agama, Negara dan Demokrasi*. Yogyakarta: Galang Press

⁵A. Ezzati. (1990). *Gerakan Islam Sebuah Analisis*, Jakarta: Pustaka Hidayah

⁶ M. Kaoy Syah. (1999). Dimensi Sosial Politik dan Pembangunan Aceh, dalam *Bunga Rapai Temu Budaya Nusantara*. Banda Aceh: Syiah Kuala Press, h 228.

kerangka membendung pergolakan politik di Aceh dalam upaya mewujudkan proses perdamaian. Kekuatan sipil yang terakomodir dalam suara santri dan ulama dayah adalah gerakan yang tumbuh untuk mencermati dan mengembalikan martabat rakyat Aceh yang identitas dengan nilai Islam di semua aspek kemasyarakatan.

Dinamika keterlibatan ulama HUDA dalam berpolitik tidak hanya sebatas politik secara substansial saja⁷ tetapi juga terlibat dengan politik praktis. Hal ini terbukti dengan sejak awal mula kemunculannya HUDA secara tidak langsung sudah terlibat politik substansial. Namun ada di antara anggota HUDA yang terlibat langsung politik praktis, di antaranya ada Tgk Muhibban yang pernah terpilih selaku anggota DPRK pada periode yang lalu dan disusul dengan Tgk Harmen Nurhikmar.

Prinsip keterlibatan ulama dayah dalam ranah politik pada dasarnya kembali kepada konteks dari ulama dan mencermati dinamika politik yang berkembang. Usman (2000) menyebutkan ada tiga aspek yang melatarbelakangi ulama ikut dalam ruang politik. Pertama, kegiatan politik menjadi bagian dari hidup dan kehidupan itu sendiri. Kedua, ulama bisa dapat terlibat dalam percaturan politik, tetapi tidak memihak pada golongan tertentu. Ketiga, Ulama tidak perlu terlibat dalam kancah politik, karena ulama merupakan pewaris para Nabi dan penjaga rohani masyarakat.

Ulama HUDA yang terjun ke dunia politik praktis ditampung melalui partai politik. Partai politik yang memiliki konektivitas yang baik dengan HUDA adalah Partai Daulat Aceh (PDA). Bagi anggota HUDA yang ingin mengikuti pemilihan politik praktis maka PDA merupakan salah satu partai yang menampung jalannya proses pemilihan. Keterlibatan HUDA lainnya dalam dunia politik di Banda Aceh adalah keterlibatannya secara substansial yang dapat dilihat dari peran penting HUDA yang dilibatkan dalam proses merancang UUPA (Undang-undang

⁷Sunyoto Usman. (2000) *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Pemerintahan Aceh). Elemen penting dan mendesak yang harus direkomendasikan pada waktu itu terkait dengan kejelasan eksistensi masyarakat Aceh dalam penerapan syari'at Islam di Aceh. Usulan yang diterima di dalam rancangan draft UUPA tersebut terutamanya menyangkut penerapan syari'at Islam, pemeliharaan situasi damai, dan pemeliharaan adat istiadat.

HUDA telah melakukan upaya-upaya dalam bentuk dukungannya terhadap pelaksanaan UUPA. Proses perdamaian dan penyelesaian konflik Aceh telah memasuki situasi penting dan strategis dengan pengesahan UUPA dan terbentuknya pemerintahan baru melalui pilkada yang damai dan demokratis. Kewenangan pemerintahan Aceh yang besar seperti tertuang dalam UUPA, menurut HUDA, seharusnya menjadi landasan utama dalam upaya memberikan kesejahteraan, keadilan dan kedamaian bagi masyarakat Aceh. Hal itu memberi dampak pada perubahan situasi sosial dan politik di Aceh. HUDA bukan hanya memperjuangkan aspirasi masyarakat Aceh khususnya tetapi juga peduli terhadap seluruh umat manusia. Hal ini tercerminkan dari sikap HUDA yang juga pernah ikut mendukung aksi demo damai dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia. Melihat fakta yang terjadi selama ini dalam hal pencegahan korupsi yang masih banyak rintangan dan halangan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak ingin korupsi dihapus di negeri ini, maka aksi demo damai dilakukan oleh berbagai komponen masyarakat sipil dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi tersebut. Ulama HUDA mendukung kegiatan tersebut asalkan dilakukan secara damai dan bermartabat.

Ulama mengingatkan para mahasiswa dan masyarakat yang melakukan aksi demo agar tidak melakukan tindakan-tindakan yang bersifat kontra produktif, melalui semangat perdamaian dalam aksi demo. Keterlibatannya membantu pemerintah dalam merancang draft UUPA terus berlanjut hingga sekarang. Para ulama HUDA selalu diundang dan dilibatkan dalam penyusunan UUPA sekalipun terjadi perubahan. Kiprahnya tidak hanya diperuntukan dalam politik saja tetapi

juga merangkap ke duniapendidikan agama Islam di Aceh. Perkembangan pendidikan agama Islam terutama di Kota Banda Aceh semakin menunjukkan kekuatannya di lembagadayah.

Menghadapi persoalan kehidupan sosial dan politik yang dinamis seperti pelaksanaan syariat islam, reintegrasi, memajukan Aceh pasca tsunami sertamembentuk pemerintahan yang bersih HUDA tidak lepas tangan begitu saja. HUDA kembali melakukan musyawarah besar dan menghasilkan beberaparekomendasi dan bekerjasama dengan pimpinan-pimpinan dayah. Adapun beberapa hasil dari musyawarah tersebut yang dijadikan rekomendasi adalah:

- a. HUDA mendukung penuh dan mengabadikan pelaksanaan klausul-klausul kesepakatan damai yang tertuang dalam MoU Helsinki dalam koridor NKRI.
- b. mendukung pelaksanaan syari'at Islam secara kaffah, diharapkan kepada Pemerintah Aceh supaya menerapkan pendidikan Islam di setiap jenjang Pendidikan yang ada di Aceh
- c. Mengharapkan kepada pemerintah Aceh dan DPRA mempercepat Pengesahan Qanun Syariat Islam, Qanun yang berkaitan dengan MPU dan qanun pendidikan yang sesuai dengan amanat MoU.
- d. Pendidikan Pesantren/Dayah harus diatur tersendiri di dalam Qanun Pendidikan, anggaran dan legalitasnya disamakan dengan pendidikan negeri.
- e. Mengharapkan Pemerintah Aceh untuk menindak dengan tegas seluruh bentuk penyelewengan yang dilakukan oleh siapapun di bumi Aceh.
- f. Mengharapkan pemerintahan Aceh dalam penempatan pejabat harus mengutamakan profesionalisme sesuai dengan keahlian dan kemampuannya.
- g. Mengharapkan kepada pemerintah Aceh dan DPRA supaya mewajibkan baca Alquran dan ilmu *fardh 'ain* sebagai salah satu syarat untuk calon

keuchik, camat, bupati/walikota dan gubernur serta pegawai negeri di Aceh.

- h. Mengharapkan pemerintah Aceh untuk tidak menjual tanah kepada pihak asing, dan tidak membenarkan penyewaannya lebih dari 10 tahun.

Rekomendasi yang dihasilkan tersebut menunjukkan pilihan sikap HUDA dalam dinamika sosial politik yang ada di Aceh dalam proses damai. Argumentasi yang dibangun HUDA maupun Thaliban sarat dalam upaya menuju pelaksanaan Syariat Islam dalam berbagai aspek kehidupan. Tuntutan inilah yang kemudian banyak dari kalangan melihat HUDA dan Thaliban gerakan sosial agama yang berbasis *revival islamic* sebagai payung dari visi dan misi gerakan.

2. Identitas Politik Kultural : Relasi Thaliban dan HUDA Menuju Damai Aceh

Proses perdamaian yang berlangsung saat ini merupakan proses perjalanan panjang sejak munculnya konflik di Aceh pada dekade tahun 50-an sampai hingga jatuhnya pemerintah Orde Baru pada tahun 1998. Masalah Aceh sejak dulu dan hingga kini masih menyisakan berbagai polemik di dalamnya. Semua polemik tersebut tidak serta merta secara spontan muncul di panggung perpolitikan saat ini, tetapi permasalahan Aceh adalah suatu kilas balik dari semua persoalan yang pernah ada sejak tahun 1953 seperti disebutkan sebelumnya, hingga munculnya gerakan Aceh Merdeka di tahun 1976. Artinya, berbagai persoalan yang muncul dari kasus Aceh adalah akibat akumulasi dari beragam kepentingan dan aspirasi, baik yang bersumber dari faktor ekonomi, politik, maupun budaya.

Bergeraknya suara-suara gerakan sipil yang berkembang di Aceh dari dulu hingga sekarang ini, sangat dipengaruhi oleh eksklamasi kondisi sosial politik di Aceh. Digelarnya beragam dialektika demokrasi yang mengakar dari elemen-elemen masyarakat, semisal dari mahasiswa, kaum ulama hingga santri secara tidak langsung memperlihatkan pada dunia, masalah Aceh pasca runtuhnya Orde Baru hingga masa reformasi masih menyisakan berbagai persoalan di dalamnya,

baik menyangkut masalah sosial, hingga kasus pelanggaran HAM yang belum selesai hingga saat ini.

Memasuki dekade, pasca perdamaian di Aceh dan berubahnya siklus perpolitikan dengan terjalannya integrasi politik lokal, dalam masyarakat memberikan warna tersendiri dalam proses berkembangnya proses demokrasi di masyarakat. Berbagai kelompok muncul, menyuarakan demoralisasi demokrasi dengan berbasis pendekatan agama misalnya, berkembang luas.

Ibrahim Bardan (atau lebih dikenal Abu Panton)⁸, dalam bukunya juga menguraikan dialektika yang tidak jauh berbeda, dimana persoalan di Aceh tidak terlepas dari persoalan historis dan dinamika konflik. Dalam buku tersebut juga menginformasikan bagaimana ulama dayah khususnya serta thaliban berperan dalam proses pelaksanaan referendum pada tahun 1999. Dinamika pemikiran dan logika politik yang dilakukan ulama dayah dan Thaliban berangkat dari persoalan krusial ketika menguatnya konflik. Dari ketiga buku diatas, persoalan Thaliban dan HUDA sedikit sekali disinggung dan masih bersifat deskriptif, tanpa didukung analisis yang eksploratif dalam menjelaskan bermacam variabel-variabel dari munculnya gerakan sipil dengan kooptasi negara atas masyarakat. Tetapi kedua buku di atas, dapat menjembatani untuk melihat logika politik yang berkembang dalam gerakan thaliban, dan HUDA khususnya, dan gerakan sipil umumnya dalam proses penyelesaian konflik Aceh.

Keterlibatan ulama HUDA dalam berpolitik tidak hanya sebatas politik secara substansial saja tetapi juga terlibat dengan politik praktis. Hal ini terbukti dengan sejak awal mula kemunculannya HUDA secara tidak langsung sudah terlibat politik substansial. Namun ada di antara anggota HUDA yang terlibat langsung politik praktis, di antaranya ada Tgk Muhibban yang pernah terpilih selaku anggota DPRK pada periode yang lalu. Kemudian disusul dengan Tgk Harmen Nurhikmar.

⁸ Ibrahim Bardan (Abu Panton). (2008). *Resolusi Konflik Dalam Islam : Kajian Normatif dan Historis Perspektif Ulama Dayah*. Banda Aceh: Aceh Institute Press, h. 107-110.

Ulama HUDA yang terjun ke dunia politik praktis ditampung melalui partai politik. Partai politik yang memiliki konektivitas yang baik dengan HUDA adalah Partai Daulat Aceh (PDA). Bagi anggota HUDA yang ingin mengikuti pemilihan politik praktis maka PDA merupakan salah satu partai yang menampung jalannya proses pemilihan. Keterlibatan HUDA lainnya dalam dunia politik di Banda Aceh adalah keterlibatannya secara substansial yang dapat dilihat dari peran penting HUDA yang dilibatkan dalam proses merancang UUPA (Undang-undang Pemerintahan Aceh).

Gerakan Thaliban sendiri mendefinisikan pembangunan politik Islam tidak harus menjadikan Aceh sebagai *Nanggroe* Islam. Sebaliknya Thaliban cenderung pada pendekatan substansialistik atas doktrin kemasyarakatan Islam dan menolak pembangunan politik yang bersifat legalitas, formalistik dan simbolik semata, namun yang terpenting bagaimana sistem politik merefleksikan nilai-nilai Islam di dalamnya. Dengan melihat konsep yang dijabarkan Esposito, *revival islamic*⁹ memposisikan gerakan Thaliban tidak hanya gerakan yang menyuarakan aspirasi pembangunan politik berasaskan nilai-nilai Islam, tetapi juga tidak *blind following* dengan carut marut pembangunan politik Islam. Bahasa dan suara revivalisme santri di bawah payung Thaliban untuk mendobrak kebekuan kehidupan sosial keagamaan tidak lain sebagai upaya membangun kembali “teologi pembebasan” nilai-nilai kehidupan individu maupun komunal.

Hal yang tidak jauh berbeda dengan ideologi politik yang dimotori HUDA dalam menyahuti pergolakan politik di Aceh dalam proses damai yang ada selama ini juga mengacu pada prinsip dengan tegaknya nilai-nilai Islam dalam semua aspek kemasyarakatan. Wajar bila kemudian disaat melihat hubungan yang dibangun HUDA dengan pemerintah, dan Thaliban dapat didefinisikan sebagai hubungan yang *autopoiesis*. Artinya, hubungan yang dibangun adalah sebuah pola yang jaringan yang di dalamnya fungsi tiap-tiap komponen berpartisipasi di dalam

⁹ John L. Esposito. (1990). *Islam dan Politik*, Jakarta: Bulan Bintang

komponen lainnya. Artinya, HUDA tidak dapat berdiri sendiri mewujudkan perdamaian di Aceh tanpa partisipasi dengan pemerintah dan santri Thaliban dalam mewujudkan *civil society*.

Visi yang dibangun HUDA dan Thaliban sama, berupaya mengembalikan identitas masyarakat Aceh yang identit dengan nilai-nilai Islam yang selama ini terdistorsi oleh *policy* yang dibangun negara dalam menghampiri rakyatnya yang tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, sosial maupun sosial politik, namun juga mengarah pada pemiskinan nilai-nilai agama dalam masyarakat.

Dengan setting sosial yang diinginkan Thaliban dan HUDA, perspektif Esposito tentang pembangunan sosial politik dalam masyarakat Islam bisa dijadikan bandingan dalam mengelaborasi lebih jauh wacana politik yang digambarkan Esposito. Jika wacana pembangunan sosial politik barat memerlukan evolusi atas dasar-dasar empirik, pembangunan sosial politik Islam memerlukan sebuah pernyataan normatif yang bukan *apoligetik*.¹⁰

Dinamika proses damai yang digusung oleh gerakan sipil seperti Thaliban dan HUDA merupakan manifestasi dari arah visi dan misi dari gerakan tersebut. Hal ini dapat dicermati dengan masih terlibatnya gerakan Thaliban dan HUDA bersuara dalam konteks mewujudkan identitas ke-Acehan, kendatipun sempat hilang di tengah eskalasi konflik dan pergulatan politik yang ada di saat konflik dan pasca konflik menguat. Thaliban dan HUDA melalui corong identitas lokal dan penguatan nilai-nilai Islam di masyarakat menjadi tolok ukur muncul kembali suara Thaliban dan HUDA yang sempat terkikis.

Melalui semangat revival ke-Acehan yang digaungkan oleh gerakan Thaliban dan HUDA menjadi eklamasi atas kekuatan politik santri tradisional dan ulama dayah tradisional mengsikapi dinamika politik yang ada di Aceh. Menyuarakan suara damai dengan slogan-slogan politik Islam seperti yang disebutkan Esposito sebelumnya, adalah proses panjang dari munculnya gerakan sipil yang mengakomodir terbangunnya pembangunan masyarakat Aceh di atas kekuatan nilai-nilai Islam yang sebelumnya sempat terabaikan oleh logika relasi negara dan masyarakat Aceh khususnya.

¹⁰ John L. Esposito. (1985). *Agama dan Perubahan Sosial Politik*, Jakarta: Aksara Persada

Pelibatan Thaliban dan HUDA dalam dinamika konstestasi proses damai hingga munculnya tuntutan reformasi atas perdamaian di Aceh, dapat dicermati dalam beberapa perpektif : *pertama*, perspektif *revivalisme*, *salafisme* dan *islamisme*. Gerakan sosial Islam atau yang berdasarkan agama pada mulanya menfokuskan perhatian pada pemurnian agama (purifikasi) berkembang menjadi sebuah ideologi untuk merespons perkembangan yang terjadi dalam masyarakat, khususnya kolonialisme, modernisme dan sekularisme yang mengukuhkan hegemoni Barat atas dunia Islam.

Gerakan sosial dengan corak ideologi revivalisme menurut Oliever Roy disebut *Islamism* dan *neo-fundamentalis*. *Islamism* merupakan paham keagamaan Islam kontemporer yang memandang bahwa Islam adalah ideologi politik (*Islamism as a political ideology*) lebih dari sekedar agama sebagaimana pandangan yang berkembang di dalam masyarakat Barat. Sedangkan John L Esposito¹¹ menyebutnya dengan upaya kembali kepada kepercayaan fundamental Islam, dalam seluruh aktivitasnya, kaum revivalis-fundamentalis mendasarkan segala aktivitasnya pada pemahaman Al-Qur'an dan Sunnah secara literal. Gerakan revivalis Islam menurut Esposito tidak identik dengan ekstremisme, fanatisme, aktivisme politik, terorisme dan anti-Amerika. Karena itu Esposito lebih memilih menggunakan *Islamic revivalism* atau aktivisme Islam, untuk menggambarkan gerakan kebangkitan Islam kontemporer, karena terma ini dianggap memiliki akar tradisi Islam.

Kedua, perspektifkultural politik. Gerakan sosial keagamaan, pada umumnya menggunakan strategi kultural untuk menghilangkan kesan adanya keterkaitannya dengan politik praktis. Kendati usaha menghilangkan kesan ini sebagian berhasil, tapi suatu tindakan sosial dengan menggunakan strategi kultural pada prinsipnya tidak steril dari motif-motif politik. Tindakan keagamaan yang bertujuan menyadarkan, mencerahkan dan memberdayakan.¹²

Ketiga, perspektif strukturasi dan agensi. Perspektif ini digunakan sebagai dasar analisis dalam menjelaskan dan memahami eskalasi dan de-eskalasi gerakan

¹¹John L. Esposito. (1992). *The Islamic Threat Myth or Reality*. Oxford: Oxford University Press, h.7-8

¹² Oliver Roy. (1994). *The Failure of Political Islam* London: I.B. Turis Publishers, h 3

sosial keagamaan. Pendekatan strukturasi akan memotret praktik-praktik sosial yang terjadi di sepanjang ruang dan waktu. Athony Giddens menyebutkan bahwa aktivitas-aktivitas sosial tidak dihadirkan oleh para aktor, melainkan terus menerus diciptakan oleh mereka melalui sarana-sarana pengungkapan diri mereka sebagai aktor, melalui aktivitasnya, para agen mereproduksi kondisi-kondisi yang memungkinkan keberadaan aktivitas-aktivitas.¹³

Keempat, perspektif integrasi. Perspektif ini biasa digunakan dalam menganalisa hubungan Islam dan politik (kekuasaan). Eksistensi gerakan sosial tidak dapat diukur dengan otonom yang bersifat kaku-rigid, tetapi kesediaan untuk mengakomodasi dan berintegrasi dengan struktur politik kekuasaan merupakan kebutuhan yang mendesak untuk terus-menerus melanjutkan proses reformasi Islam, merekonsiliasi komitmen Muslim dengan kebutuhan-kebutuhan praktis masyarakat, melalui keterlibatan "agen-agen intelektual" dalam struktur negara.

Ideologi politik HUDA maupun Thaliban yang berazaskan nilai Islam yang bersumber kepada Alquran dan hadist jelas terlihat dari beberapa rekomendasi yang pernah diberikan oleh HUDA dalam Musyawarah besarnya pasca MoU. Di antaranya adalah pengimplementasi syariat Islam, memberikan legalitas yang sama terhadap pendidikan dayah maupun modern sederajat dengan pendidikan formal, melibatkan MPU dalam izin mendirikan berbagai macam usaha di Kota Banda Aceh serta mengikutsertakan semua kalangan ulama yang ada di Kota Banda Aceh untuk membentuk *draf* UUPA maupun Qanun-Qanun maupun juga dalam konteks menjaga perdamaian di Aceh.

D. KESIMPULAN

Pelibatan Thaliban dan HUDA dalam proses damai di Aceh sebagai local identity yang berupaya mewujudkan makna damai dalam konteks ke Aceh yang seringkali terabaikan oleh negara di saat melihat pergulatan politik yang panjang dari dinamika tradisi sentralistik-otoritarian sebagai pemandu jalan pembangunan di semua aspek yang sering digunakan pemerintah. Wacana pembangunan politik

¹³Anthony Giddens, (1984). *The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration* USA: University of California Press

melaui proses damai yang dikembangkan Thaliban dan HUDA lebih berorientasi pada upaya membangun kesadaran politik di atas nilai-nilai Islam yang mampu membawa kesejahteraan masyarakat. Konsep revival dari relasi yang dibangun Thaliban dan HUDA sebagai pejawatahan komunitas santri dan ulama dayah tradisional tidak lain berupaya mempertahankan nilai-nilai perdamaian berasaskan identitas keacehan yang regigious dalam semua lini kehidupan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbasi, V., & Marzieh, K. (2017). Law Part of the Framework for Accountability in Policy Interpretation and Practice. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 5(1), 91-100. doi:10.26811/peuradeun.v5i1.122
- Bardad, Ibrahim. (2008). *Resolusi Konflik Dalam Islam kajian Normatif dan Historis Ulama Dayah*, Aceh Institute Press, Banda Aceh.
- Crow, Karim D. (2000). *Aceh : The Special Territory in North Sumatera : A self-Fulfilling*, dalam *Journal of Muslim Minority Affair*, Vo. 20 No. 1,
- Dhuhri, S. (2016). Art as A Cultural Instrument: The Role of Acehnese Art in Resolving Horizontal Conflict. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 4(1), 89-102. doi:10.26811/peuradeun.v4i1.88
- Effendy, Bahtiar. (2001). *Teologi Baru Politik Islam : Pertautan Agama, Negara dan Demokrasi*, Galang Press, Yogyakarta.
- Esposito, John L. (1985). *Agama dan Perubahan Sosial Politik*, Aksara Persada, Jakarta.
- Esposito, John L. (1990). *Islam dan Politik*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Esposito, John L. (1992). *The Islamic Threat Myth or Reality* (Oxford: Oxford University Press).
- Ezzati, A. (1990). *Gerakan Islam Sebuah Analisis*, Pustaka Hidayah, Jakarta, 1990.
- Giddens, Anthony. (1984). *The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration* USA: University of California Press.
- Murziqin, R. (2013). The Political Dynamics of Military Pensions in Indonesia. *Austrian Journal of Political Science*, 42(2), 145-160.
- Murziqin, R. (2014). Politics of Power and Its Influence on Elections in Indonesia. *Asian Journal of Political Science*, 22(2), 181-205.
- Murziqin, R. (2015). Government Authority in the Application of Islamic Sharia. *Journal of Islamic Law and Culture*, 13(2), 321-332

- Murziqin, R. (2017). Context for Local Democracy and Problems Autonomy. *British Journal of Political Science*, 47(1), 19-30.
- Murziqin, R., & Tabrani ZA. (2016). The Importance of Local Parties and Incumbency to the Electoral in Aceh. *Journal of Islamic Law and Culture*, 10(2), 123-144.
- Murziqin, R., & Tabrani ZA. (2017). A Consequence of Institutionalized Political Inequality. *Journal of Political Sciences & Public Affairs*, 4(3), 231-242
- Noer, Deliar. (1983). *Pengantar ke Pemikiran Politik*, Radjawali Press, Jakarta.
- Patji, Abdul Rachman dkk. (2004). *Negara dan Masyarakat dalam Konflik Aceh : Studi Tentang Peran Pemerintah dan Masyarakat Dalam Penyelesaian Konflik Aceh*, LIPI, Jakarta.
- Roy, Oliver. (1994). *The Failure of Political Islam* London: I.B. Turis Publishers.
- Sanusi, S., Yusuf, R., & Jannah, M. (2017). The Understanding of Political Elites on the Consensus of Nation and State Life. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 5(2), 253-272. doi:10.26811/peuradeun.v5i2.147
- Syah, M. Kaoy. (1999). *Dimensi Sosial Politik dan Pembangunan Aceh, dalam Bunga Rapai Temu Budaya Nusantara*, Syiah Kuala Press, Banda Aceh.
- Tabrani ZA & Murziqin, R. (2015). Political Education in Maturation Democracy in Indonesia. *British Journal of Political Science*, 45 (1), 215-226
- Tabrani ZA. (2011a). Dynamics of Political System of Education Indonesia. *International Journal of Democracy*, 17(2), 99-113.
- Tabrani ZA. (2016a). Perubahan Ideologi Keislaman Turki (Analisis Geo-Kultur Islam dan Politik Pada Kerajaan Turki Usmani). *JURNAL EDUKASI: Jurnal Bimbingan Konseling*, 2(2), 130-146. <https://doi.org/10.22373/je.v2i2.812>
- Tabrani ZA. (2016b). Transformasi Teologis Politik Demokrasi Indonesia (Telaah singkat Tentang Masyarakat Madani dalam Wacana Pluralisme Agama di Indonesia). *Al-Ijtima`i-International Journal of Government and Social Science*, 2(1), 41-56.
- Usman, Sunyoto. (2000). *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Walidin, W., Idris, S., & Tabrani ZA. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif & Grounded Theory*. Banda Aceh: FTK Ar-Raniry Press.
- Zanabazar, A., Ukhnaa, M., Xuexi, H., Bira, S., Jigjiddorj, S., & Pagvajav, O. (2017). The Current Situation and Trend of the Labor Force of Mining Sector in Mongolia. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 5(3), 341-350. doi:10.26811/peuradeun.v5i3.175

